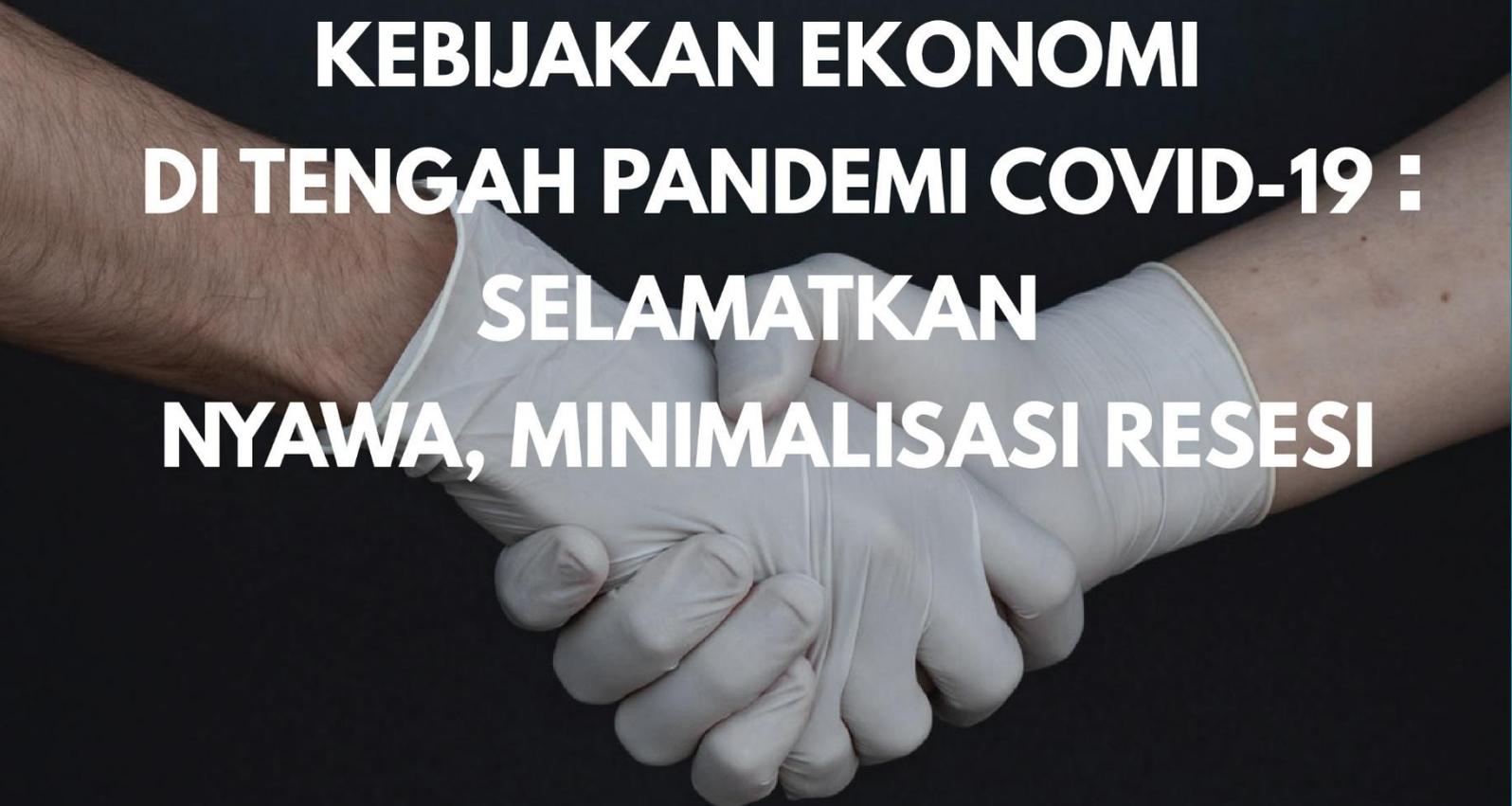




UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia

Policy Brief 1



KEBIJAKAN EKONOMI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 : SELAMATKAN NYAWA, MINIMALISASI RESESI

DISUSUN OLEH

Tim Ahli Universitas Indonesia

Pelindung :

Rektor Universitas Indonesia
Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D

Pengarah :

Wakil Rektor bidang Riset dan Inovasi UI
Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris

Pelaksana Kegiatan :

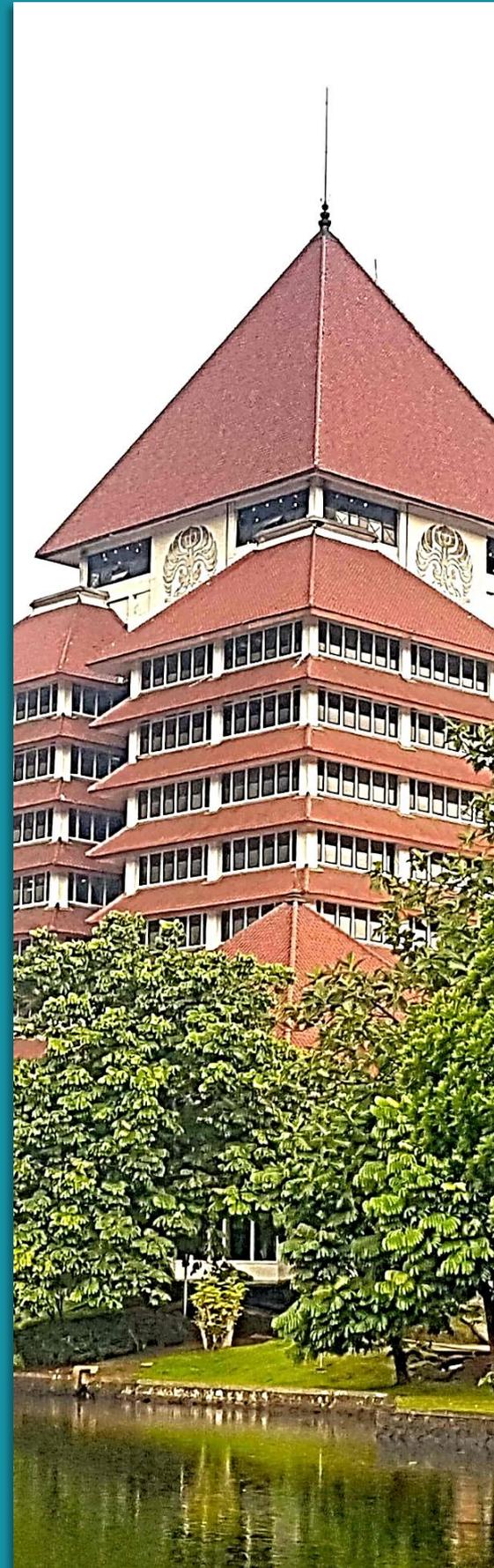
Direktur Inovasi dan *Science Techno Park* UI
Ahmad Gamal, S.Ars., M.Si., M.U.P., Ph.D

Penulis :

Teguh Dartanto, Ph.D

Tim Perumus :

1. Teguh Dartanto, Ph.D
2. Muhammad Halley Yudhistira, Ph.D
3. Rus'an Nasrudin, S.E., MDEC, Ph.D
4. Jahan Fachrul Rezki, M.Sc., Ph.D
5. Muhammad Hanri, Ph.D
6. Chaikal Nuryakin, Ph.





KEBIJAKAN EKONOMI DI TENGAH PANDEMI COVID-19: SELAMATKAN NYAWA, MINIMALISASI RESESI

- Menghadapi pandemi Covid-19, kebijakan ekonomi hendaknya selalu dilandasi asumsi untuk mencari keseimbangan antara keselamatan dan kesehatan masyarakat dengan ekonomi, tanpa memprioritaskan antara satu dengan lainnya.
- Indonesia akan memiliki tiga tantangan besar dalam menekan sebaran infeksi Covid-19, yaitu: sektor kesehatan yang lemah, kapasitas fiskal yang terbatas, dan disiplin masyarakat yang rendah. Bauran kebijakan supresi yang tepat akan menentukan hasil *containment* yang optimal.
- Pemerintah diharapkan dapat membagi fokus penanganan pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi menjadi 2 (dua) periode utama. Periode pertama

merupakan periode jangka pendek dan mendesak dengan berfokus kepada pengurangan penambahan korban jiwa dari Covid-19. Sementara itu, periode kedua akan meliputi rencana jangka menengah dan panjang pasca berakhirnya masa-masa kritis pandemi.

- Pada periode jangka pendek, Pemerintah diharapkan dapat lebih berfokus kepada *emergency response*, terutama dalam rangka: 1) mengurangi dampak ekonomi jangka pendek yang dihadapi oleh masyarakat karena Covid-19, 2) menjaga agar kegiatan ekonomi tetap bisa berjalan pada saat terjadinya pandemi, dan 3) ketika krisis akibat Covid-19 usai, perekonomian bisa langsung bergerak dengan cepat.
- Kebijakan jangka menengah dilakukan dengan meminimalkan resesi berfokus pada mengurangi tekanan dari sisi penawaran (*supply shocks*). Memastikan perusahaan untuk langsung beroperasi, menjaga kesinambungan sektor logistik, serta mendorong kemandirian industri alat kesehatan maupun rantai industrinya menjadi kunci.

Paradigma Kebijakan

Covid-19 telah menjadi fokus perhatian dunia sejak World Health Organizations (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi sejak Maret 2020. Pada 15 April 2020, terdapat hampir dua juta kasus positif dengan korban meninggal sebesar 123 ribu di seluruh dunia. Indonesia mengumumkan kasus positif pertama kali pada awal Maret 2020. Hingga 15 April 2020, lebih dari lima ribu kasus positif kasus Indonesia dengan *fatality rate* mencapai 9 persen¹. Dibutuhkan sebuah kebijakan komprehensif dalam menangani pandemi ini yang menyentuh berbagai aspek, sehingga proses mitigasi dapat berjalan dengan baik.

Kebijakan ekonomi hendaknya selalui dilandasi asumsi untuk mencari keseimbangan antara keselamatan dan kesehatan masyarakat dengan ekonomi, tanpa memprioritaskan antara satu dengan lainnya. Perekonomian yang terdampak akibat

¹ Terdapat kekhawatiran bahwa kasus positif COVID-19 Indonesia cenderung *under-reported* mengingat keterbatasan dalam proses pengujian sampel lab.

² dibandingkan dengan adanya intervensi, hingga setara PDB Indonesia 2019.

pandemi Covid-19 ini akan berakibat lebih jauh terhadap keberlangsungan kehidupan rakyat Indonesia. Namun demikian, mengingat korban jiwa yang terus bertambah, maka perlu kiranya upaya dalam usaha penyelamatan jiwa dan

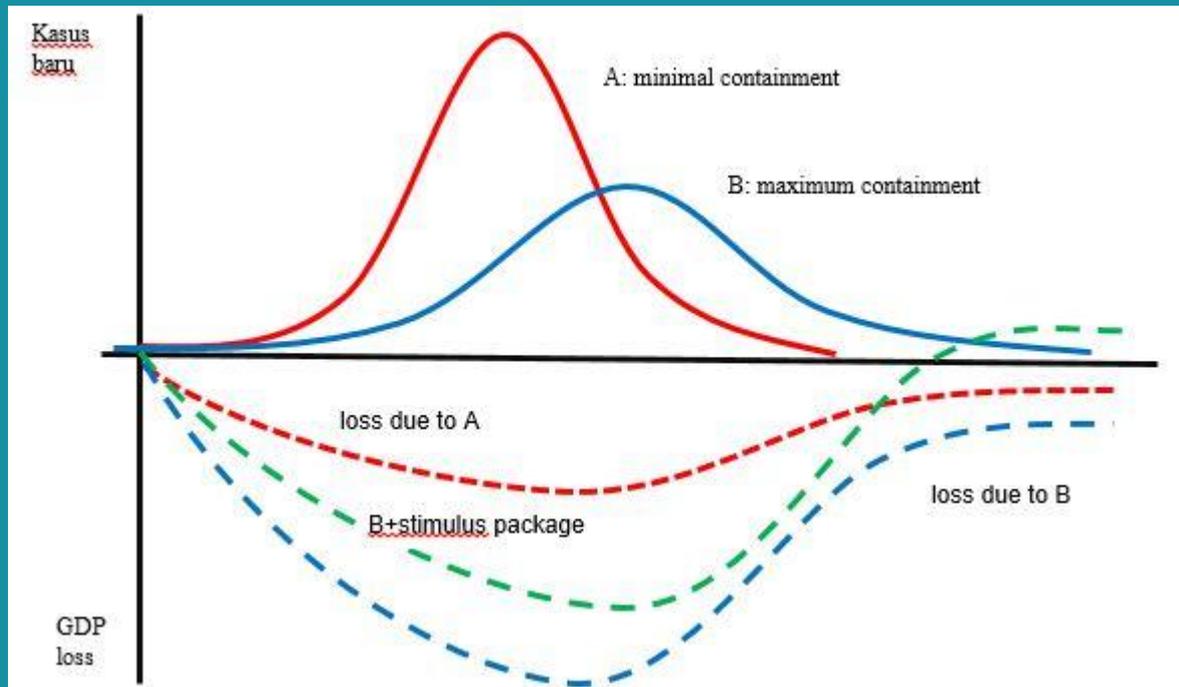
kesehatan untuk dikedepankan khususnya dalam jangka pendek. Dengan demikian, paket kebijakan disusun hendaknya dapat selaras dengan *containment strategy* yang dipilih sehingga dapat meminimalkan korban, stimulus diberikan dengan kerangka pikir (i) *disaster relief* dalam jangka pendek, dan (ii) menghindari resesi di jangka menengah (Gambar 1). Upaya utama untuk menekan kerusakan ekonomi dari krisis kesehatan Covid-19 bertumpu pada upaya menekan penyebaran infeksi dengan konsekuensi sosial dan ekonomi besar dan berat bagi masyarakat. Bentuknya beragam, mulai dari penutupan perbatasan untuk kedatangan warga negara asing, upaya mitigasi pembatasan sosial seperti penutupan sekolah, sampai surpresi dalam bentuk karantina wilayah secara total.

Review Kebijakan Menekan Sebaran Infeksi

Indonesia memiliki tiga tantangan besar dalam menekan sebaran infeksi: **sektor kesehatan yang lemah, kapasitas fiskal yang terbatas, dan disiplin masyarakat yang rendah**. Keberhasilan menekan sebaran wabah akan berpengaruh terhadap jumlah korban jiwa. Dan kemampuan ini juga ditentukan oleh kapasitas sektor kesehatan, baik tenaga maupun fasilitas kesehatan. Penguasaan teknologi untuk melakukan tes Indonesia juga terbatas. Kemampuan anggaran pemerintah pusat dan daerah terbatas untuk memperbesar kemampuan sektor kesehatan. Di samping itu, kemampuan serap sektor kesehatan untuk alokasi anggaran yang lebih besar pun juga terbatas. Untuk menekan sebaran infeksi, diperlukan disiplin masyarakat yang tinggi. Namun dengan belum terbangunnya kesadaran bahaya infeksi Covid-19, harapan untuk kedisiplinan ini akan sulit.

Gambar 1. Relasi Proses Mitigasi Penyebaran Dan Kebijakan Ekonomi

(Diadaptasi dari Baldwin, 2020)



Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 ini telah diprediksi akan mengalami kontraksi yang signifikan. Tingkat ketidakpastian yang tinggi menunjukkan masih adanya risiko *downside* pada proyeksi. Meskipun berbagai lembaga (seperti IMF, ADB dan World Bank) memprediksi pertumbuhan Indonesia akan tetap positif meskipun berkurang signifikan, namun proyeksi pertumbuhan oleh berbagai lembaga internasional tersebut menunjukkan divergensi di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19. Di samping itu, resesi atau perlambatan ekonomi juga terjadi secara luas, dimana mitra dagang utama Indonesia pun akan mengalami kontraksi.

Dari sisi fiskal, penerimaan akan mengalami risiko revisi yang diprediksi akan cukup signifikan. Ketidaksepakatan negara-negara OPEC mengenai pengurangan produksi minyak berdampak terhadap rendahnya komoditas minyak. Proyeksi akan lemahnya harga komoditas ke depan dapat menyebabkan eksportir komoditas mengalami tekanan dari sisi

pembiayaan dan aktivitas usahanya. Porsi pendapatan negara yang masih cukup didominasi dari sektor migas sekiranya perlu mendapatkan perhatian utama dari Pemerintah terkait proyeksi penurunan harga komoditas ini.

Di tingkat global, kebijakan surpresi menjadi pilihan utama melalui upaya menekan sebaran infeksi dengan penerapan jaga jarak yang sangat ketat skala besar, hingga penerapan karantina wilayah. Para peneliti dan ahli epidemiologi sangat menekankan penerapan surpresi karena dua resiko besar jika upaya ini tidak dilakukan. Pertama adalah, jangka waktu untuk ditemukannya vaksin masih cukup lama. Kedua, tidak semua negara memiliki sistem layanan kesehatan yang kuat. Sebaliknya, kebijakan mitigasi dalam menekan sebaran infeksi tanpa melakukan upaya keras untuk memutus rantai penyebaran berimplikasi pada jumlah kematian yang cukup tinggi secara akumulatif. Dalam konteks ekonomi, ini merupakan hilangnya *human capital*—investasi yang cukup mahal dan perlu waktu lama.

Rendahnya kasus terkonfirmasi di negara-negara dengan kemampuan tes atau deteksi Covid-19 yang rendah, termasuk Indonesia menjadi krusial perlu untuk direspon dengan cepat. Rendahnya kemampuan tes berimplikasi pada dua hal. Pertama jumlah kasus terkonfirmasi seolah-olah rendah. Kedua, tingkat kesadaran publik untuk melakukan pembatasan sosial menjadi lebih rendah. Selain itu, secara praktis, tes yang rendah juga menyulitkan tenaga kesehatan untuk melakukan antisipasi dan perencanaan penanganan kasus positif dengan baik dan efisien. Peningkatan kapasitas tes, khususnya PCR (*Polymerase Chain Reaction*) sangat mendesak dan penting untuk dilakukan.

Emergency response: Disaster relief process, lives first

1

Skema stimulus kesehatan dan bantuan kesejahteraan

Kebijakan jangka pendek berorientasi pada *disaster relief process* dengan titik tekan pada stimulus sektor kesehatan dan bantuan kesejahteraan bagi rakyat yang terdampak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara, antara lain: meningkatkan jumlah tempat tidur, jumlah staf medis, *ventilators*, alat pelindung diri (APD), peningkatan jumlah dan skala tes Covid-19, memberikan insentif untuk pengembangan vaksin atau alat-alat kesehatan mutlak dilakukan di atas segala-galanya. Tanpa memprioritaskan sektor kesehatan, kebijakan ekonomi tidak akan berarti terlalu banyak.

Dari sisi ekonomi, Pemerintah diharapkan dapat segera melakukan berbagai *emergency responses* dalam rangka menangani dampak yang ditimbulkan dalam jangka pendek, melalui 3 (tiga) hal utama sebagai berikut: 1) mengurangi dampak ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat karena Covid-19, 2) menjaga perekonomian untuk tetap berjalan, dan 3) mengupayakan agar perekonomian bisa bergerak cepat ketika krisis ini telah usai. Ada dua pihak yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pertama adalah **pekerja atau rumah tangga** dan kedua adalah **perusahaan atau industri**. Dalam rangka mengurangi dampak ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, pemerintah dapat fokus kepada masyarakat yang akan terkena dampak paling besar. Seperti pekerja kerah biru, pekerja dengan upah harian atau upah sangat rendah, pekerja usia muda, pekerja di sektor informal, para pengangguran, para pencari kerja, dan juga orang-orang yang bekerja sendiri (*self-employed*). Pekerja-pekerja ini membutuhkan dukungan finansial karena ketidakpastian ekonomi yang mereka hadapi. Lebih dari itu, pekerja sektor informal ini merupakan mayoritas dari total pekerja di Indonesia dan yang akan merasakan dampak paling besar.

Penyediaan kebijakan asuransi sosial (*social insurance*) untuk kelompok yang paling rentan atau untuk semua masyarakat (*universal coverage*) perlu dipertimbangkan. Pandemi ini berpotensi dapat menambah 1 juta orang miskin baru (SMERU, 2020). Pilihan kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah menggunakan program yang telah dimiliki

sebelumnya (e.g. Program Keluarga Harapan, Bantuan Program Pangan Non Tunai, *etc.*) atau memberikan transfer uang tanpa syarat (*unconditional cash transfer*). *Trade-off* kebijakan yang terjadi adalah antara membuat program yang lebih *targeted* atau memberikan *universal check* ke semua masyarakat Indonesia (*non-targeted*) atau dikenal sebagai *helicopter money*. Tentunya jika memilih kebijakan yang *non-targeted* dibutuhkan biaya dan proses birokrasi yang tinggi. Bauran kebijakan distribusi bantuan perlu dipertimbangkan untuk mempercepat proses dan kualitas *disbursement*, termasuk pelibatan e-wallet, *delivery* berbasis komunitas, dan penggabungan NIK antar database.

Kelompok kelas menengah yang *vulnerable* perlu mendapat perhatian khusus setelah kelompok paling rentan karena akan mulai terdampak jika pandemi terjadi semakin panjang. Modifikasi *Proxy Mean Test* (PMT) perlu bergeser dari aset fisik menjadi aset finansial (*liquiditas*) untuk mengidentifikasi kelompok ini. *Social safety net* serupa dengan kelompok rentan dapat diberikan kepada kelompok ini bila kondisi semakin genting.

Perhatian khusus kepada industri yang memiliki kesulitan untuk membayar kredit/cicilan (*credit constraint*) khususnya UMKM dan industri yang terkena dampak paling besar dari tidak berjalannya perekonomian dalam beberapa waktu terakhir (kerajinan tangan, tekstil, restoran, hotel, industri hiburan, *e-commerce*, *gig-economy*). Kita sudah mendengar banyak perusahaan *e-commerce* yang telah melakukan *lay-off* karyawan sebagai imbas dari wabah Covid-19. Hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah memastikan sektor-sektor ini tidak gulung tikar ketika ekonomi sudah bisa berjalan seperti semula. Bantuan untuk sektor industri bisa berupa utang atau hibah. Jika memilih untuk memberikan utang, pemerintah bisa menagih utang tersebut ketika perusahaan telah mampu membayarnya. Jika memilih memberikan hibah, tentunya harus melihat seberapa besar kemampuan pemerintah. Sektor perbankan juga akan menghadapi masalah likuiditas (*liquidity constraints*) dan kredit macet (*Non Performing Loan*). Bank Sentral bisa membeli surat utang pemerintah (*government bonds*) yang dapat menurunkan suku bunga. Selain itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa memberikan kelonggaran waktu bagi pembayaran cicilan utang jatuh tempo. Di samping itu, likuiditas dari lembaga keuangan non-perbankan, terutama asuransi dan dana pensiun perlu juga mendapatkan perhatian. Pemerintah diharapkan dapat mengantisipasi misalnya

tekanan likuiditas dari sisi dana pensiun sebagai akibat dari penarikan JHT para pekerja yang mengalami PHK.

Ketergantungan Indonesia yang sangat tinggi terhadap barang impor dari China tentunya akan berpengaruh terhadap proses produksi dalam negeri dan memberikan disrupsi terhadap *supply chain* dalam negeri³. Negara dan perusahaan-perusahaan nasional mungkin bisa mulai melakukan penjajakan dan diversifikasi terhadap barang impor yang diproduksi oleh negara-negara selain dari China. Pemerintah juga bisa mulai melihat kemungkinan perubahan *supply chain* di dalam negeri dengan melihat *production network* yang telah ada.



³ Studi yang dilakukan oleh Carvalho, et al. (2016) menunjukkan bahwa gempa yang terjadi di Jepang pada tahun 2011, memberikan disrupsi terhadap sektor hulu dan hilir, khususnya ketersediaan barang-barang yang dibutuhkan dunia usaha dan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara kuantitas, disrupsi terhadap *supply chain* ini mengurangi produk domestik bruto Jepang pada tahun 2012 sebesar 1.2 persen.

2

Sumber Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan fiskal ini bisa dilakukan dengan menggunakan jurus keberlangsungan utang (*debt sustainability*). Utang pemerintah akan meningkat karena biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani Covid-19 akan sangat besar. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus melambat disertai dengan rendahnya suku bunga. Implikasinya adalah konsumen melakukan *precautionary saving*, dimana masyarakat akan mengurangi konsumsi dan meningkatkan simpanan karena adanya ketidakpastian terhadap pendapatan di masa yang akan datang ditambah investasi juga akan rendah. Sehingga peningkatan utang untuk saat ini tidak akan memberikan dampak yang terlalu besar, dengan catatan tidak ada efek eksternal yang bakal mempengaruhi utang negara.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan tekanan yang cukup kepada para lembaga donor internasional untuk membuka berbagai keran pembiayaan, baik yang bersifat normal maupun mendesak. Salah satu hal penting terkait *debt sustainability* ini adalah Pemerintah dapat melakukan negosiasi untuk mendapatkan fleksibilitas, baik dari sisi pencairan pendanaan maupun skema pengembalian.

Realokasi dan penambahan anggaran secara umum diharapkan agar dapat lebih menitikberatkan, dalam jangka pendek, kepada intervensi penanggulangan Covid-19 dari sektor kesehatan. Meskipun saat ini Pemerintah telah melakukan penambahan APBN, namun perlu dipertimbangkan kembali alokasi dari penambahan anggaran dimaksud. Salah satu hal yang cukup penting untuk mendapatkan perhatian adalah upaya untuk meningkatkan proporsi relokasi dan penambahan anggaran pada sisi intervensi kesehatan, terutama dalam jangka pendek jika dibandingkan dengan pemulihan ekonomi.

Selain itu pemerintah juga dapat merelokasi anggaran yang sebelumnya dipersiapkan untuk pembangunan ibukota negara yang akan memakan biaya yang sangat besar. Cara yang lain dan telah dilakukan oleh Bank Sentral adalah dengan melakukan *debt monetization* (kegiatan pemerintah dibiayai oleh Bank Sentral dengan membeli surat utang pemerintah). Tapi implikasi bisa ke tingkat inflasi dan tentunya akan berdampak pada masyarakat miskin. Terakhir, pemerintah telah mengeluarkan *Coronabonds*, kita belum bisa melihat implikasinya untuk saat ini, tetapi sepertinya respons pasar terhadap penerbitan surat utang pemerintah ini relatif baik.

Kebijakan Jangka Menengah: *Minimize Recession*

Kebijakan jangka menengah berpusat pada proses meminimalkan resesi pasca pandemi dimana perekonomian mengalami "*double hit*" dari dalam dan luar negeri, tidak hanya di sisi fiskal. Kebijakan yang sama/mirip yang dilakukan di jangka pendek berpotensi dilanjutkan di jangka menengah, tapi dengan ukuran yang berbeda. Penghapusan atau penundaan pembayaran pajak hanya membantu dalam jangka pendek untuk meringankan biaya kapital (*cost of capital*) dan biaya tetap (*fixed cost*), maupun likuiditas rumah tangga. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah sebagaimana berikut dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang.

Mempertahankan perusahaan untuk hanya berhenti beroperasi namun tetap hidup (*keep the light bulbs*) atau yang dikenal dengan *shutdown*. Dalam arti jika pandemi selesai perusahaan bisa langsung memproduksi. *Shutdown* dalam teori dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dengan perusahaan hanya menanggung biaya dari kapital (*cost of capital*). Untuk itu paket kebijakan dalam mengurangi biaya kapital ini adalah esensial bagi kelangsungan hidup. Yang kedua adalah operasi kembali bisa dilakukan dengan kecepatan menarik kembali tenaga kerja. Kebijakan *job*

3

retention scheme perlu dipertimbangkan untuk menjamin pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk diprioritaskan oleh pemberi kerja sebelumnya, supaya bisa bekerja kembali di tempat semula. Sehingga waktu mencari pekerjaan (*job search period*) akan menjadi singkat dan tentunya mempercepat pemulihan kegiatan ekonomi. Untuk itu pada saat pandemi diharapkan adanya tanggung renteng beban antara perusahaan, pemerintah, dan pekerja dalam skema gaji masa *shutdown*. Jika pemutusan kerja tidak bisa dihindarkan, *social safety net* untuk pekerja perlu diperpanjang.

Sustaiabilitas sektor pangan dan makanan dan minuman jadi adalah kunci dari sustainabilitas perekonomian. Sektor pangan mengalami penurunan permintaan yang signifikan oleh karena penurunan permintaan dari agen ekonomi berskala besar. Dengan turunnya permintaan, harga akan cenderung turun (telah terjadi untuk kasus daging ayam dan telur) dibawah biaya produksi untuk itu, pemerintah harus mensubsidi biaya input atau melakukan mekanisme harga batas bawah atau masuk ke pasar untuk melakukan pembelian. Sektor pangan juga memerlukan perhatian dengan semakin terbatasnya jumlah yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional terutama beras.

Penguatan industri dalam negeri terutama industri alat kesehatan perlu dipastikan sebagai antisipasi merebaknya pandemi di masa yang akan datang. Kemandirian industri terutama alat kesehatan perlu digaungkan. Ketergantungan impor yang relatif tinggi atas alat kesehatan menyebabkan antisipasi yang lamban terhadap COVID-19 di masa-masa awal penyebaran, bahkan membuat kelangkaan. Memastikan pasokan alat kesehatan yang memadai dan bekerja sama dengan produsen dan rumah sakit swasta dalam menjaga pasokan alat kesehatan sangat penting untuk diperhatikan.

Dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah, maka Pemerintah diharapkan dapat melakukan kebijakan stimulus secara selektif kepada berbagai perusahaan. Adapun dalam rangka menerapkan kebijakan stimulus yang selektif dimaksud, Pemerintah dapat menggunakan



indikator-indikator, antara lain sebagai berikut:

- Merupakan sektor esensial
- Memiliki kontribusi besar dalam Produk Domestik Bruto
- Memiliki pekerja yang relatif besa
- Rutin membayar pajak (mengalami keuntungan yang *sustainable*)

Jika kebijakan dari sisi penawaran telah diambil maka fokus kebijakan jangka menengah selanjutnya yang dapat diambil oleh pemerintah adalah upaya-upaya pemulihan *aggregate demand*. Penghapusan pajak seperti PPN dan PPh setelah pandemi akan membantu mendorong permintaan. Selain itu, pemerintah harus memberi stimulus kepada rumah tangga untuk konsumsi barang manufaktur, dan sektor jasa seperti restoran, hotel dan pariwisata serta angkutan dan penerbangan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada sektor pariwisata dan penerbangan udara yang paling terdampak oleh pandemi ini (LPEM, 2020)⁴. Dengan adanya mitigasi terhadap *credit crunch* yang terjadi sehingga investasi akan bergerak seiring permintaan yang mulai tumbuh. Pemerintah juga bisa mendorong investasi melalui BUMN dan pembangunan infrastruktur kesehatan dan ekonomi digital. Untuk itu, dari sisi kebijakan moneter, suku bunga dan inflasi rendah merupakan prasyarat pemulihan ekonomi di jangka menengah dan panjang.

Fleksibilitas atas batas defisit sangat perlu dipertimbangkan kembali mengingat paket kebijakan memberi beban yang lebih besar kepada anggaran pemerintah. Tekanan akan lebih besar di tengah ketidakpastian pada durasi dari pandemi ini.

⁴ Studi yang dilakukan oleh Carvalho, et al. (2016) menunjukkan bahwa gempa yang terjadi di Jepang pada tahun 2011, memberikan disrupsi terhadap sektor hulu dan hilir, khususnya ketersediaan barang-barang yang dibutuhkan dunia usaha dan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara kuantitas, disrupsi terhadap *supply chain* ini mengurangi produk domestik bruto Jepang pada tahun 2012 sebesar 1.2 persen.



Semakin panjang pandemi berlangsung semakin penting kebijakan yang diambil pada saat pandemi dan semakin terbatas opsi yang dimiliki untuk kebijakan jangka menengah dan panjang. Diperlukan kebijakan untuk menarik dana dari luar negeri dan memanfaatkan dana yang dimiliki oleh Bank Indonesia serta dana yang selama ini parkir pada akun pemerintah daerah.

Suku bunga dan inflasi rendah merupakan prasyarat pemulihan ekonomi di jangka menengah dan panjang. Hal ini diperlukan untuk mendorong peningkatan permintaan rumah tangga dan perusahaan. Suku bunga rendah akan menurunkan biaya kapital dan mendorong investasi baru. Inflasi yang rendah dan stabil juga akan memberikan kepercayaan kepada agen ekonomi untuk melakukan investasi dan konsumsi.

KESIMPULAN

Penanganan pandemi COVID-19 Indonesia diibaratkan sebuah marathon dengan sprint pada 1-5 kilometer pertama. Penanganan ini diharapkan agar mengedepankan penyelamatan nyawa sebanyak-banyaknya pada jangka pendek dengan paradigma disaster relief, dan kemudian pemulihan ekonomi dan kesejahteraan dalam jangka menengah dan panjang. Social safety net selama disaster relief diperlukan tidak hanya bagi kelompok miskin tetapi juga masyarakat menengah vulnerable. Bauran kebijakan distribusi diperlukan untuk mempercepat proses dan kualitas disbursement. Kebijakan untuk UKM dan perbankan diarahkan untuk meringankan likuiditas. Dalam proses recovery jangka menengah, fokus kebijakan ada pada pengurangan tekanan dari sisi penawaran. Memastikan dunia usaha untuk langsung beroperasi, menjaga kesinambungan sektor logistik dan mendorong kemandirian industri alat kesehatan menjadi kunci.

Daftar Pustaka

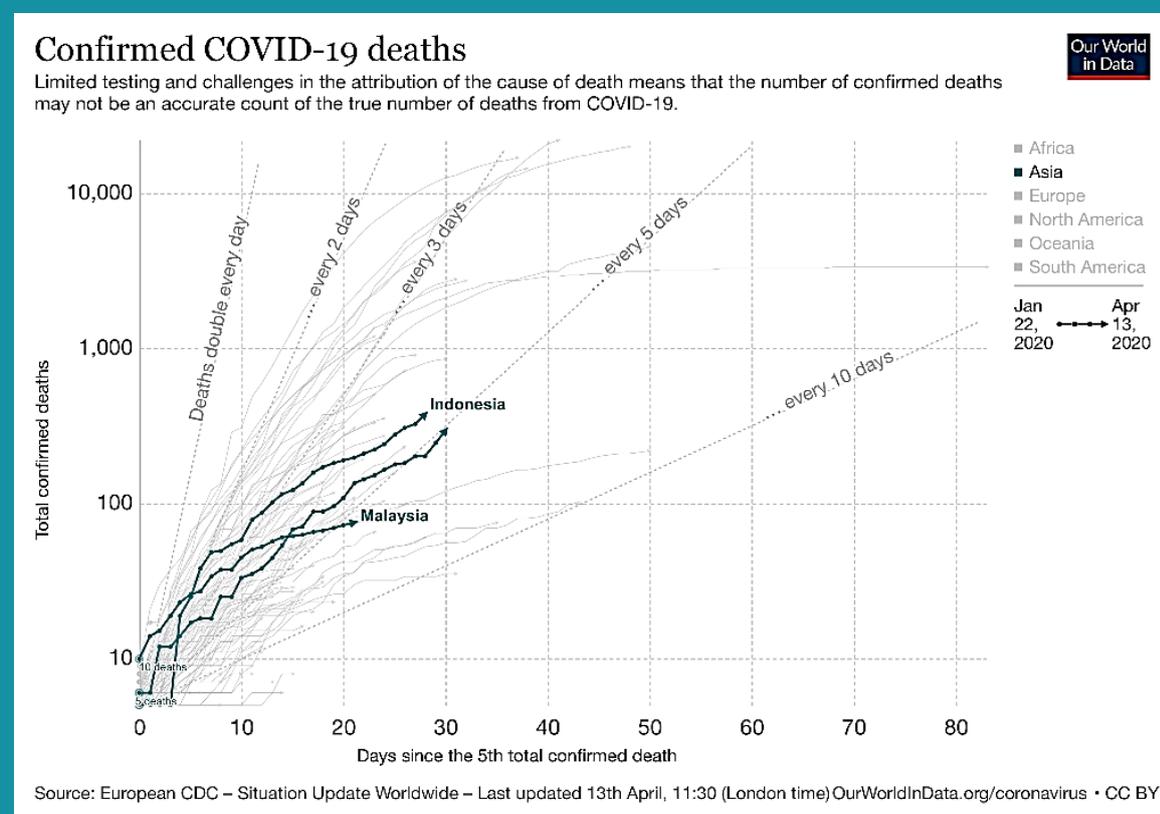
Carvalho, V. M., Nirei, M., Saito, Y., & Tahbaz-Salehi, A. (2016). Supply chain disruptions: Evidence from the great East Japan earthquake. *Columbia Business School Research Paper*, (17-5).

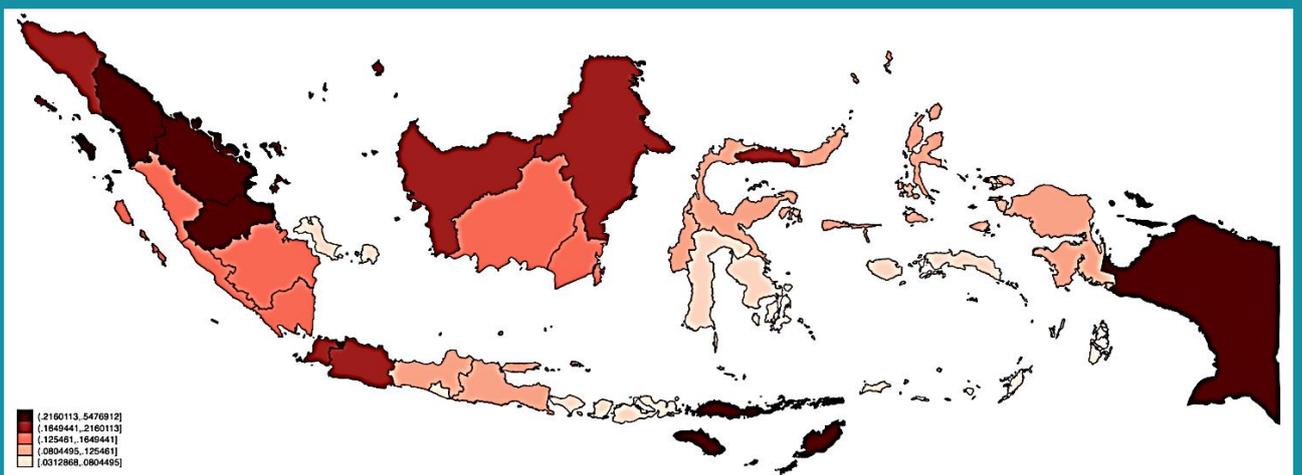
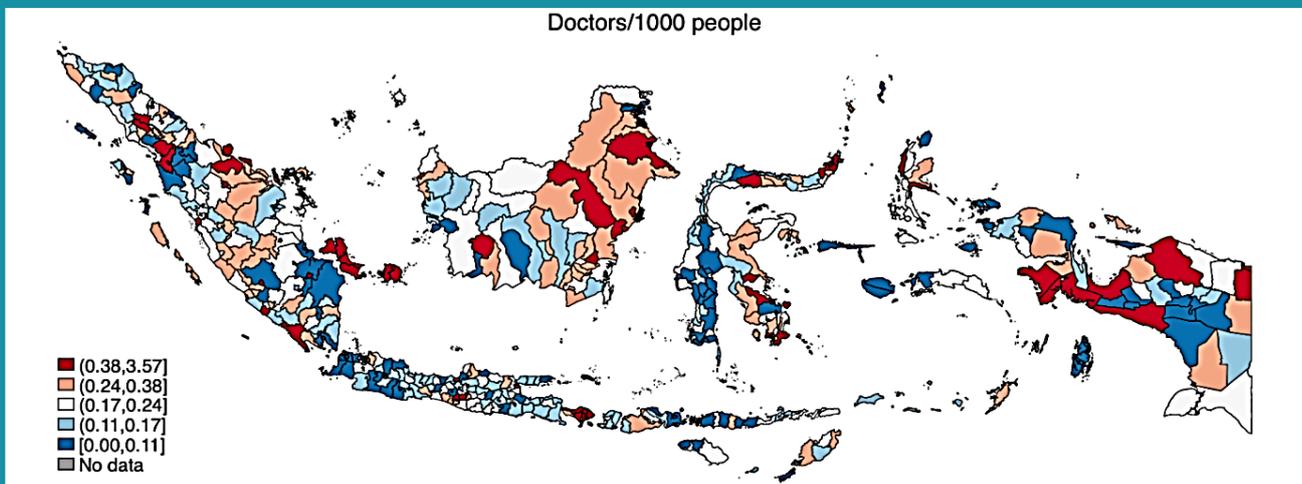
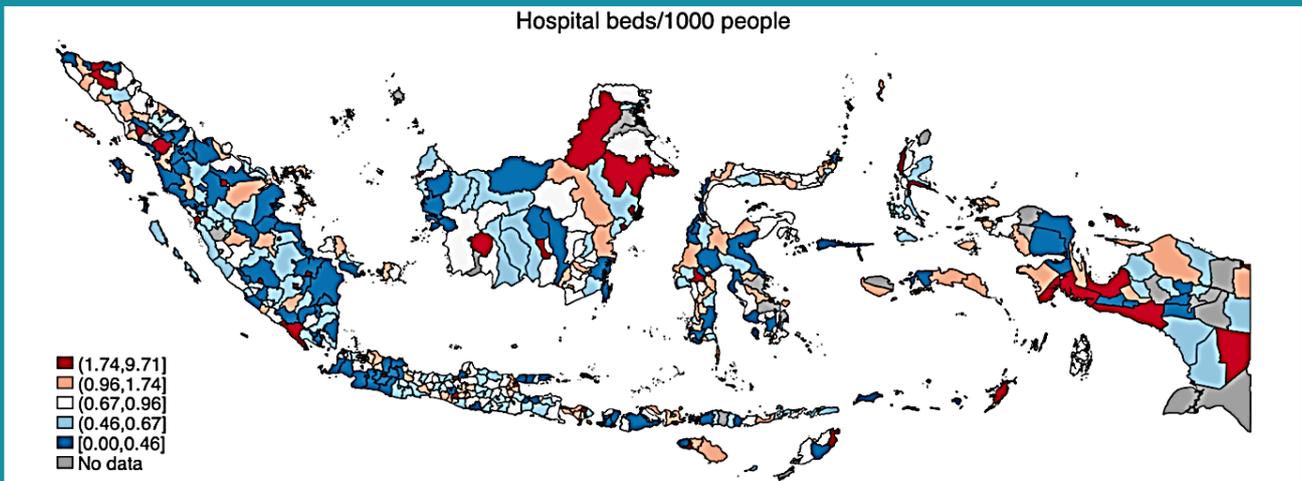
Gourinchas, Pierr-Olivier. (2020) Flattening the pandemic and recession curves. dalam *Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes*. Eds. Richard Baldwin dan Beatrice Weder di Mauro. VoxEU.org.

Revindo, M. D., Sabrina, S., & Sowwam, M. (2020). *Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pariwisata Indonesia: Tantangan, Outlook dan Respon Kebijakan*. LPEM Briefing Note.

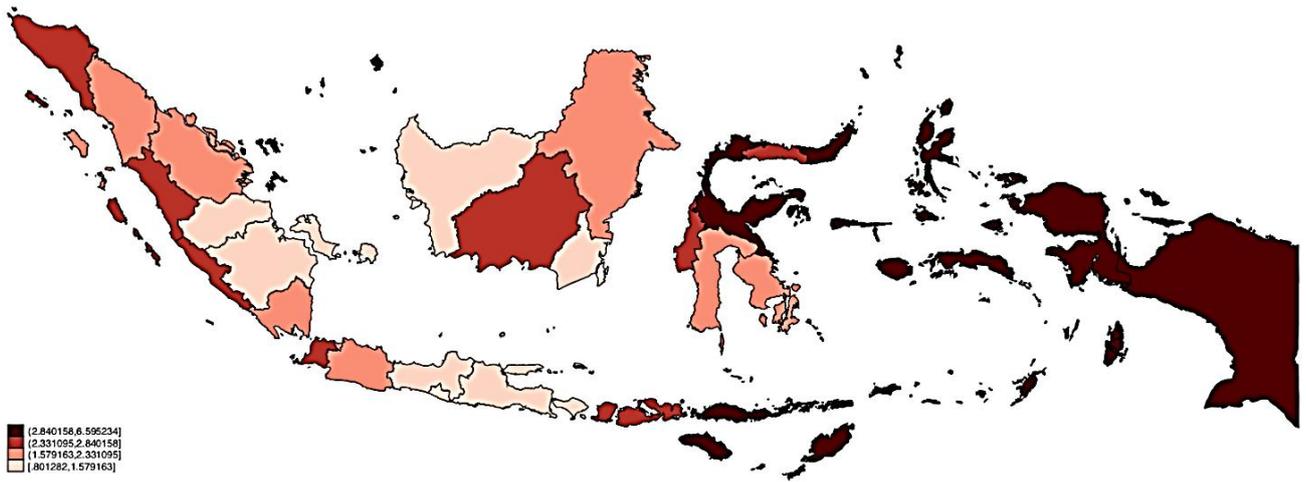
Suryahadi, A., Izzati, R.A., & Suryadarma, D. (2020). *The impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An estimation for Indonesia*. SMERU Working Paper.

LAMPIRAN





Akses Rumah Tangga pada Fasilitas Cuci Tangan (% RT)
Warna semakin gelap semakin buruk



Kondisi Rawan Pangan (% RT dengan Ketahanan Pangan Buruk)
Warna semakin gelap semakin buruk

